

## ABSTRAK

Implementasi dalam kebijakan publik, merupakan proses penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan nyata guna mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian ini membahas implementasi Qanun No. 13 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana di Desa Pelita Sagop Jaya, Kabupaten Aceh Timur, yang berfokus pada upaya mitigasi banjir. Fenomena yang diamati adalah masih terjadinya banjir secara berulang di desa tersebut, meskipun Qanun tersebut telah diberlakukan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Qanun tersebut dengan menguji tiga aspek utama, yaitu: komunikasi dalam persiapan mitigasi, ketersediaan sumber daya, dan disposisi pemerintah terhadap pembangunan tanggul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan, termasuk aparatur desa, masyarakat, perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Observasi lapangan dan studi dokumentasi juga dilakukan untuk memperkuat data dan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya komunikasi yang dilakukan oleh BPBD, meskipun sudah dilakukan, belum berjalan secara efektif karena rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya detail informasi, dan keterbatasan jangkauan penyebaran informasi. Ketersediaan sumber daya, baik personil, peralatan, maupun anggaran, masih sangat minim, sehingga menghambat pelaksanaan program mitigasi. Disposisi pemerintah daerah terhadap pembangunan tanggul juga belum menunjukkan dukungan yang kuat, sehingga pembangunan tanggul permanen belum terealisasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan alokasi anggaran, penyediaan sumber daya yang memadai, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam upaya mitigasi bencana. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan efektivitas komunikasi melalui pengembangan program sosialisasi yang lebih partisipatif dan informatif. Pemerintah daerah perlu menunjukkan komitmen yang lebih konkret terhadap pembangunan tanggul sebagai upaya mitigasi jangka panjang.

**Kata Kunci : Implementasi, Pembangunan Tanggul, Bencana.**

## ABSTRACT

*Implementation, in the public policy, is the process of translating policy into concrete actions to achieve desired outcomes. This study examines the implementation of Qanun No. 13 of 2009 concerning Disaster Management in Pelita Sagop Jaya Village, Aceh Timur Regency, focusing on flood mitigation efforts. The persistent occurrence of floods in the village, despite the enactment of the Qanun, highlights a discrepancy between policy and practice. This research aimed to analyze the Qanun's implementation by examining three key aspects: communication in mitigation preparedness, resource availability, and government disposition towards embankment construction. This study employed a qualitative approach using a case study design. Data were collected through in-depth interviews with various informants, including village officials, community members, representatives from the Regional Disaster Management Agency (BPBD), and the Public Works and Housing Agency (PUPR). Field observations and document studies were also conducted to strengthen data analysis. The findings reveal that communication efforts undertaken by the BPBD, although present, have not been fully effective due to low community participation, lack of detailed information, and limited reach. Resource availability, encompassing personnel, equipment, and budget, remains minimal, hindering the implementation of mitigation programs. Furthermore, the local government's disposition towards embankment construction has not demonstrated strong support, resulting in the non-realization of permanent flood mitigation infrastructure. This study recommends increasing budget allocation, providing adequate resources, and strengthening coordination among stakeholders for effective disaster mitigation. Furthermore, enhancing communication quality and effectiveness through the development of more participatory and informative socialization programs is crucial. The local government must demonstrate a concrete commitment to embankment construction as a long-term mitigation measure.*

**Keywords: Implementation, Embankment Construction, Disaster**